

Peran Kepemimpinan Kepala Desa dan Fungsi Pengawasan BPD Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Supriyati

Universitas Negeri Surabaya

Anang Kistyanto

Universitas Negeri Surabaya

Dewie Tri Wijayati Wardoyo

Universitas Negeri Surabaya

Abstract

The aim of this research is to determine the influence of the Village Head Leadership variable on the accountability of village fund management. This type of research is survey research with a quantitative descriptive approach. The sample for this research was 186 respondents, determined using a non-probability sampling method. The technique used is purposive sampling technique. Data were analyzed using multiple linear regression analysis. The analysis shows that partially the leadership variables of the village head and the supervisory function of the Village Consultative Body (BPD) have a significant effect on the accountability of village fund management. Then, simultaneously the leadership variables of the village head and the supervisory function of the Village Consultative Body (BPD) have a significant effect on the accountability of village fund management. To increase accountability in managing village funds, village governments need to update and report village finances via digital media, increase the capacity of state officials in managing village funds, increase compliance with existing operational standards and regulations, and village heads need to supervise the community. Apart from that, future researchers should add other independent variables that are effective in measuring the accountability of village fund management.

Keywords: Village Head Leadership, BPD Oversight Function, Accountability, Village Funds

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Kepemimpinan Kepala Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Sampel penelitian ini sebanyak 186 responden yang ditentukan dengan menggunakan metode non probability sampling. Teknik yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial variabel kepemimpinan kepala desa dan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kemudian, secara simultan variabel kepemimpinan kepala desa dan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, pemerintah desa perlu memperbarui dan melaporkan keuangan desa melalui media digital, meningkatkan kapasitas aparatur negara dalam mengelola dana desa, meningkatkan kepatuhan terhadap standar operasional dan peraturan yang ada, dan kepala desa perlu melakukan pengawasan terhadap masyarakat. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lain yang efektif dalam mengukur akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Kepemimpinan Kepala Desa, Fungsi Pengawasan BPD, Akuntabilitas, Dana Desa

1. Pendahuluan

Pemerintah pusat menerapkan dan mengawasi hukum birokrasi pemerintahan desa untuk memastikan tata kelola pemerintahan desa yang efektif (Safrida & Priyanti, 2023). Desa adalah komunitas hukum dengan batas wilayah yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pemerintah Pusat RI, 2014).

Dana desa diberikan kepada desa oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan anggaran bagi pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer ke desa melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan hal-hal lainnya (Mahyudin et al., 2022). Sejak 2018, pemerintah mengalokasikan dana desa yang signifikan jumlahnya setiap tahun untuk diberikan kepada desa (Khan et al., 2023). Besarnya akumulasi dana yang diberikan kepada desa, maka pemerintah telah membuat peraturan untuk memastikan bahwa dana tersebut dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa mengaturnya. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban adalah langkah pertama dalam mengelola dana desa (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014). Semua proses pengelolaan dana desa harus didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabel. Salah satu pilar tata kelola dana desa adalah akuntabilitas (Safrida & Priyanti 2023). Pemerintah desa harus bertanggung jawab, menunjukkan, dan mengungkapkan semua tindakan mereka kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Akuntabilitas yang baik menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan pembagian dana desa dapat berdampak bagi pemberdayaan masyarakat (Zahro *et al.*, 2023).

Kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi pemerintah desa, dan sistem keuangan desa (SISKEUDES) sangat penting untuk pengelolaan dana desa yang efektif (Ayem & Fitriyaningsih 2022). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa adalah pemegang otoritas untuk mengelola dana desa (Riyatna & Gayatri Gayatri 2021). Salah satu hambatan dalam pengelolaan dana desa adalah kurangnya sumber daya perangkat desa dan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah. Oleh karena itu, sebagai pengelola keuangan desa, seorang kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan desa dapat diukur dari beberapa faktor, seperti kapasitas perangkat desa, partisipasi masyarakat, dan kepemimpinan kepala desa (Han & Perry, 2020). Sebagai pengelola keuangan desa, seorang kepala desa memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya fokus membahas pada

kepemimpinan kepala desa, Fungsi BPD serta akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian terdahulu telah dilakukan terkait ketiga aspek ini.

Kepemimpinan kepala desa berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa dengan optimal dan berkelanjutan (Rahmat & Hermana 2018). Temuan Fatolosa Hulu & Rahim (2022) menunjukkan kepemimpinan, kompetensi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Pratama & Islamuddin (2024) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur, sedangkan Jahira *et al.* (2023) menjelaskan bahwa kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat (Jahira *et al.* 2023). Demikian juga Nandyasa Vania Sarinastiti and Bhilawa (2023) menyatakan bahwa kepemimpinan kepala desa dan pengawasan masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Nandyasa Vania Sarinastiti & Bhilawa (2023) menyatakan kepemimpinan kepala desa dan pengawasan masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang telah dijelaskan ini menyatakan bahwa variabel kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur/pegawai dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Studi ini bertentangan dengan temuan penelitian-penelitian dari Mahayani (2017), yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh kepemimpinan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ayem & Fitriyaningsih (2022) menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa dan sistem keuangan desa (SISKEUDES) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, tetapi kepemimpinan kepala desa; partisipasi masyarakat dan komitmen organisasi pemerintah desa tidak berpengaruh.

Semua elemen harus terlibat dalam pembangunan desa, terutama masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Partisipasi masyarakat tidak hanya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga membantu mengidentifikasi masalah dan kemungkinan. Tidak ada pembangunan yang berhasil tanpa partisipasi masyarakat, terutama dalam pengawasan (Zahro *et al.*, 2023). Diharapkan partisipasi masyarakat akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Dana Desa (Azhari *et al.*, 2021). Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan evaluasi, dimana masyarakat yang berpartisipasi dalam tahap evaluasi, memberikan saran dan kritik yang membangun kepada pengelola anggaran Dana Desa demi kepentingan bersama. Penelitian yang dilaksanakan ini, fokus ke pengawasan yang dilakukan melalui fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintah desa mempunyai kewenangan pada penyelenggaraan pemerintah untuk melakukan pengawasan supaya sesuai kebutuhan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawasi dana desa agar tidak disalahgunakan (Rumbia *et al.*, 2023). BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk menjalankan fungsi pengawasan, yang menjadi partner kerja pemerintah desa dan mempunyai kedudukan sejajar. Salah satu pengawasan yang dilakukan pada penggunaan dana desa. Peran pengawasan BPD tersebut memiliki urgensi yang diperlukan. Pengawasan bertujuan untuk melakukan penyelesaian terhadap tiga permasalahan utama,

yaitu penyeimbangan tujuan, kapasitas dalam adaptasi lingkungan dan integrasi (koordinasi) (Faysal, 2023). Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dibentuk secara demokratis berdasarkan UU tentang Desa dan anggotanya adalah wakil dari penduduk desa yang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah. BPD bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan dana desa (Faysal 2023; Zahro *et al.*, 2023). Tidak sejalan dengan Rumbia *et al.* (2023), penelitiannya menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan keuangan desa belum optimal, karena kurang transparansi anggaran dana desa kepada masyarakat dan dilihat dari indikator pengawasan maka pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana sebelumnya.

Penelitian terdahulu tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa dan faktor yang mempengaruhi, relatif banyak dilakukan (Riyatna dan Gayatri Gayatri 2021; Safitri *et al.*, 2023; Sujatnika dan Sulindawati 2022). Safitri *et al.* (2023) menganalisis *Good Government Governance* yang terdiri dari variabel transparansi, akuntabilitas, partisipasi, undang-undang, dan perilaku kepemimpinan kepala desa, berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Temuannya menunjukkan bahwa akuntabilitas, undang-undang, dan perilaku kepemimpinan kepala desa berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa, sedangkan transparansi dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh nyata. Zahro *et al.* (2023) mempelajari efek kualitas sumber daya manusia, pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan partisipasi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Studi ini menemukan bahwa masyarakat desa tidak menganggap transparansi dan akuntabilitas sebagai hal yang sangat penting. Sebaliknya, mereka lebih menekankan kerja sama untuk menciptakan transparansi dengan melibatkan seluruh warga desa dalam pengelolaan dana desa. Untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, diperlukan tenaga kerja berkualitas tinggi, BPD yang efektif, dan keterlibatan masyarakat dalam pertemuan yang transparan dan akuntabel tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Penelitian selanjutnya hasilnya berbeda dengan penelitian sebelumnya. Riyatna & Gayatri Gayatri (2021) memiliki perbedaan hasil dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya ditemukan bahwa kepemimpinan kepala desa dan kemampuan perangkat desa memiliki dampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan partisipasi masyarakat tidak memiliki dampak yang signifikan. Sujatnika dan Sulindawati (2022) menunjukkan bahwa variabel sistem pelaporan (X1), kompetensi perangkat desa (X2), dan kepemimpinan kepala desa (X3) serta partisipasi masyarakat (X4) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Strategisnya peran kepala desa, hanya masyarakat desa yang dapat menentukan kelebihan dan kekurangan dari kepala desa. Pengawasan masyarakat melalui Fungsi BPD sangat penting untuk pengelolaan dana desa. Ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan penyimpangan dan pemanfaatan anggaran yang tidak tepat sasaran.

Grand teori penelitian ini terdiri dari tiga teori, yaitu teori keagenan/agensi (*Agency Theory*), teori perilaku (*Behavior Theory*), dan teori kepemimpinan (*Leadership Theory*). Teori keagenan berkaitan dengan kepala desa yang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku bawahannya (Jensen & Meckling, 2019). Teori kepemimpinan

berkaitan dengan akuntabilitas (Vagelos & Galambos, 2012), Teori perilaku berkaitan dengan cara kepala desa mengelola desanya, terutama dalam hal pengelolaan dana desa dan pengawasan masyarakat (Freestone & Balci, 2019).

Novelty dari riset ini dengan mengembangkan variabelnya. Jika sebelumnya penelitian terdahulu menggunakan variabel kompetensi ataupun kinerja dari aparatur desa sesuai dengan penelitian dari (Putri & Yadiati, 2020) dan juga variabel Kepemimpinan kepala desa dan pengawasan masyarakat sesuai dengan hasil penelitian dari (Nandyasa Vania Sarinastiti & Bhilawa, 2023), maka penelitian ini akan lebih spesifik meneliti bagian terpenting dari aparatur desa yaitu kepemimpinan kepala desa. Demikian juga dengan variabel partisipasi masyarakat dari penelitian terdahulu, maka akan lebih spesifik meneliti variabel fungsi pengawasan BPD.

Dari penjelasan diatas tentang bagaimana kepala desa dalam memimpin suatu desa dan pengawasan dari masyarakat melalui Fungsi BPD, terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa yang belum dijalankan secara baik, sehingga menyebabkan maraknya kasus terkait dana desa serta adanya hasil yang tidak sama pada penelitian sebelumnya, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Kepemimpinan Kepala Desa dan Fungsi Pengawasan BPD Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”.

Bagaimana desa mengelola anggaran yang besar dengan sumber daya yang beragam? Selain itu, sebagian besar masyarakat desa tidak terlalu terlibat dalam pengelolaan anggaran desa. Beberapa desa berhasil mengelola dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sementara beberapa desa gagal melakukannya. Peneliti ingin mengetahui bagaimana kepemimpinan kepala desa dan fungsi pengawasan BPD mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam konteks di mana pemerintah desa merupakan struktur pemerintahan terendah dengan sumber daya manusia dan latar belakang yang beragam, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala desa dan fungsi pengawasan BPD terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Landasan Teori

2.1 Teori Keagenan/Agensi (*Agency Theory*).

Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik atau pimpinan (*principal*) dan manajemen (*agent*). *Principals* adalah pihak yang memberikan wewenang kepada agen untuk melakukan semua tugas atas nama *principals* sebagai pengambil keputusan (Jensen & Meckling, 2019). Hubungan antara agen dan prinsipal untuk memenuhi kewajiban demi kepentingan prinsipal. Sebaliknya, agen adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk menjalankan kepentingan prinsipal (Scott, 2015). Teori keagenan berkaitan dengan kepala desa yang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku bawahannya. Rakyat sebagai prinsipal adalah pemimpin dalam organisasi sektor publik, dan pemerintah, sedangkan kepala desa dan aparat lainnya, adalah agen (Jensen & Meckling, 2019). Hubungan antara agen dan prinsipal dijelaskan dengan menggunakan teori keagenan dan relevan pada pengelolaan dana desa,

Kepala desa memiliki tiga peran utama yaitu motivator, fasilitator, dan mobilisator, Tjokroamindjojo (2006) dalam Syafitri dan Suriani, (2019). Sebagai motivator, kepala

desa memberikan dorongan kepada masyarakat agar terpicu untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Sebagai mobilisator, kepala desa yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah aktivitas pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Peran sebagai fasilitator, kepala desa menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa (Basri *et al.*, 2021).

2.2 Teori Perilaku (*Behavior Theory*)

Teori perilaku berkaitan dengan cara kepala desa mengelola desanya, terutama dalam hal pengelolaan dana desa dan pengawasan masyarakat (Freestone & Balci, 2019). Pemerintah desa pasti berjalan dengan baik jika masyarakat mengawasinya dengan baik. Pengawasan (*controlling*) berarti menetapkan apa yang sudah dilaksanakan, artinya adalah mengevaluasi prestasi kerja serta dapat mempraktikkan tindakan-tindakan korektif sehingga cocok dengan apa yang telah direncanakan. (Faysal, 2023). Masyarakat dilibatkan dalam pengawasan agar kegiatan pemerintah desa dapat berjalan sesuai dengan dana yang sudah ditetapkan karena besarnya jumlah dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah (Nandyasa Vania Sarinastiti & Bhilawa 2023). Pengawasan masyarakat melalui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pengelolaan Dana Desa, karena tujuannya untuk melakukan penyelesaian terhadap tiga perkara utama, yaitu penyeimbangan tujuan (kerja sama), kapasitas dalam penyesuaian lingkungan dan integrasi (koordinasi) (Akbar, 2017). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertujuan supaya rotasi dana yang dilakukan pada suatu pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan keabsahan data laporannya (Akbar, 2017).

2.3 Teori Kepemimpinan (*Leadership Theory*).

Teori kepemimpinan berkaitan dengan akuntabilitas (Vagelos & Galambos, 2012). Kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin yang mempunyai kekuasaan mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin dapat mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengkomunikasikan dan mengoordinasikan bawahan mereka untuk mencapai tujuan (Siahaan & Komariah 2022). Kepemimpinan perannya kuat dan kritis untuk meningkatkan prestasi kerja, baik pada tingkat individual, kelompok, dan organisasi. Pemimpin yang dinamis dan kreatif akan membuat organisasi yang dipimpinnya menjadi semakin dinamis dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan akan semakin banyak. Sebaliknya, jika seorang pemimpin kurang kreatif dan tidak dinamis maka organisasi yang dipimpinnya akan menjadi vakum. Dengan demikian, kegiatan dan dinamika organisasi sangat ditentukan oleh cara pemimpin dalam menggerakkan sumber-sumber manajemen yang ada dalam organisasi yang dipimpinnya (Ayuandani & Muniruddin, 2022).

Salah satu model kepemimpinan yang relevan dengan kepemimpinan kepala desa, dijelaskan oleh Firmansyah *et al.*, (2022) bahwa terdapat pengaruh positif kepemimpinan transformasional dan manajemen pengetahuan terhadap organisasi. Ditemukan juga bahwa pembelajaran organisasi berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan memediasi hubungan antara kepemimpinan transformasional dan manajemen pengetahuan terhadap

kinerja. Erlina et al., (2023) menggunakan metode *Structural Equation Model Partial Least Square* (SEM-PLS), mengungkapkan peran mediasi perilaku kerja inovatif dalam hubungan antara kepemimpinan transformasional dan kinerja karyawan, serta hubungan antara efikasi diri dan kinerja karyawan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya menumbuhkan perilaku kerja inovatif sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja karyawan secara keseluruhan, khususnya dalam konteks kepemimpinan transformasional dan efikasi diri di tempat kerja.

Model kepemimpinan menurut Tjokroamidjojo dalam Syafitri & Suriani (2019) dijelaskan kedalam 3 hal yaitu; motivator, fasilitator dan mobilisator. Motivator merupakan dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan seorang individu lainnya sedemikian rupa, sehingga orang yang diberikan motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional dan penuh tanggung jawab. Fasilitator adalah seorang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama – sama. Sedangkan mobilisator ialah orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, pentingnya kepemimpinan kepala desa untuk menumbuhkan perilaku kerja inovatif sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

2.4 Akuntabilitas

Akuntabilitas/tanggungjawab adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (*Zahro et al.*, 2023). Pemegang amanah, agen, kepala desa, dan aparatnya harus bertanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban, menunjukkan, melaporkan, dan mengungkapkan semua tindakan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Kepala desa dan aparaturnya bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang diberikan, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala (*Purba et al.*, 2023). Mardiasmo (2006) dalam Safitri et al. (2023) menjelaskan bahwa transparansi berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh tentang tanggung jawab pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan.

2.5 Kepemimpinan Kepala Desa

Kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu agar dicapai hasil yang diharapkan (*Badu & Djafri*, 2017). Menurut Elizabeth o'Leary (2001), seorang pemimpin adalah orang yang ditunjuk dalam suatu kelompok tim atau organisasi, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan tegas dan mengilhami orang lain, dan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang lain (*Ayem dan*

Fitriyaningsih 2022). Sistem kepemimpinan sebagai salah satu komponen organisasi yang memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan organisasi (Supriyadi & Budiarto, 2012).

Perangkat desa adalah bagian dari pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengembangkan masyarakat. (Sujatnika & Sulindawati, 2022). Penelitian terdahulu tentang kepemimpinan yang dilakukan oleh Dewi & Gayatri (2019) menunjukkan bahwa pendidikan dan pengalaman membentuk kualitas kepemimpinan yang baik. Jika pemimpin pemerintah lebih memahami kepentingan masyarakat dan bekerja sama dengan masyarakat, masyarakat akan lebih baik dalam melaksanakan dan membantu pemerintah mengelola perangkat daerah (Dewi & Gayatri, 2019). Seorang kepala desa selaku pemegang pengelolaan keuangan desa sangat penting perannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penelitian Pawirosumarto & Sarjana (2017) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Mahayani (2017) yaitu tidak terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁: Kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa

2.6 Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan telah mendapatkan alokasi dana desa. Sumber daya manusia, pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan partisipasi masyarakat mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Zahro et al., 2023). Krisnanti et al. (2022) menunjukkan bahwa kepemimpinan, kejelasan sasaran anggaran, dan pengawasan memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kualitas sumber daya manusia (SDM), pengawasan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD), partisipasi masyarakat, dan sistem keuangan desa juga mempengaruhi fungsi pengawasan uhi akuntabilitas pengelolaan dana desa (Nurhayati et al., 2021). Efektivitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala desa dan kapasitas perangkat desa (Supriyadi dan Budiarto 2012). Dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) mempunyai peran penting terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H₂: Terdapat pengaruh signifikan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.

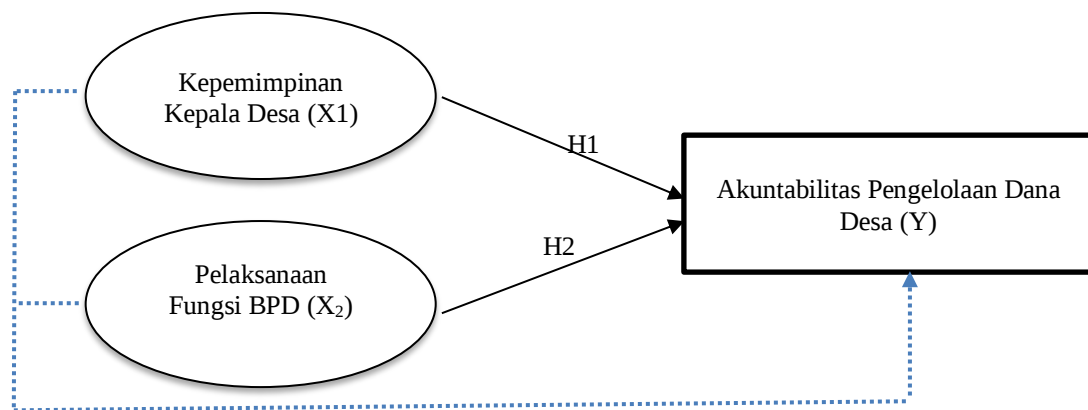
Penelitian yang dilakukan oleh Ayem and Fitriyaningsih (2022); Nafsiah & Diana (2020); Nandyasa Vania Sarinastiti & Bhilawa (2023); Riyatna & Gayatri Gayatri (2021); Silviyana *et al.* (2022) membuktikan bahwa kepemimpinan kepala desa memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Azhari *et al.* (2021); Nurhayati *et al.* (2021); Purba *et al.* (2023); Purbandari & Saptatiningsih (2020); Rumbia *et al.* (2023); Supriyadi & Budiarto (2012); Zahro *et al.* (2023) Pengaruh positif menunjukkan bahwa Peran dan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting terhadap terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana

desa. Kompetensi perangkat desa melalui kepemimpinan kepala desa yang memadai, partisipasi warga yang tinggi khususnya kualitas pengawasan BPD, dikuatkan dengan penerapan teknologi informasi yang baik, dan penerapan sistem pengendalian intern yang tepat, dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini teruji di masa pandemi COVID-19. Pada akhirnya, faktor kepemimpinan dan pengawasan masyarakat melalui BPD, mempengaruhi efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada waktu yang sama atau sepanjang waktu (Ayuandani & Muniruddin, 2022). Namun penelitian yang dilakukan Nurhayati et al., (2021); S. Purba *et al.* (2023) menjelaskan bahwa tidak semua faktor seperti kepemimpinan kepala desa dan pengawasan BPD secara simultan atau bersama-sama selalu berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H3: Kepemimpinan Kepala Desa serta Fungsi BPD secara simultan mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, landasan teori dan pengembangna hipotesis, maka dapat digambarkan kerangka konseptual dalam penelitian ini. Adapun kerangka konseptual hubungan antar variabel dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Keterangan :

- = Pengaruh simultan
- = Pengaruh parsial

3. Metode

3.1 Jenis dan Metode Pengumpulan Data Penelitian

Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan variabel secara apa adanya didukung dengan data-data berupa angka yang dihasilkan dari keadaan sebenarnya. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data melalui kuesioner, observasi dan wawancara (Sugiyono, 2013).

3.2 Populasi dan Sampel

Penentuan sampel penelitian menggunakan metode *non-probabilitas sampling*, Metode ini tidak menggunakan teknik acak, sehingga pemilihan responden sering kali didasarkan pada pertimbangan tertentu, seperti aksesibilitas, ketersediaan, atau karakteristik tertentu. Teknik yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel di mana peneliti memilih individu atau kelompok berdasarkan kriteria tertentu yang relevan

dengan tujuan penelitian. Karakteristik sampel adalah orang yang menjabat sebagai perangkat desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), tokoh masyarakat, maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kriteria ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa responden tersebut pernah menerima dan mengetahui informasi tentang kepemimpinan kepala desa maupun tugas BPD, sehingga paling tidak menjadi bagian dalam suatu aliran informasi. Cara untuk menentukan ukuran sampel, dengan rumus Slovin.

Unit analisisnya adalah perangkat desa yang memiliki hak serta kewajiban pada proses pengelolaan keuangan desa yang terdiri unsur LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) yaitu dari unsur RT, RW, Kader PKK, Kader Posyandu, Karang Taruna dan Linmas. Teknik pengumpulan data dengan survei menggunakan kuesioner, selain juga melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Adapun sebaran sampel penelitian dalam penelitian ini adalah data populasi yang merupakan sumber sekunder yang telah diperoleh peneliti berdasarkan data yang diperoleh di desa dan di kecamatan. Data Sekunder tersebut selanjutnya diolah oleh peneliti menggunakan rumus Slovin sehingga diperoleh sampel penelitian.

Tabel 1
Sebaran Sampel Penelitian

No	Nama Desa	Jumlah PERADES	RT	RW	Kader PKK	LKD		Jumlah
						Kader POSYANDU	LINMAS	
1	Baleasri	11	1	1	1	1	1	16
2	Bangsri	12	1	1	1	1	1	17
3	Balegondo	13	1	1	1	1	1	18
4	Mojopurno	11	1	1	0	1	1	15
5	Sumberdukun	11	1	1	1	1	1	16
6	Selopanggung	11	1	1	1	1	1	16
7	Pendem	6	1	1	1	1	1	11
8	Ngariboyo	10	1	1	0	0	0	12
9	Selotinatah	11	1	1	1	1	1	16
10	Banjarpanjang	10	1	1	1	1	1	15
11	Banyudono	11	1	1	1	1	1	16
12	Banjarejo	14	1	1	0	1	1	18
Jumlah Sampel								186

Sumber: Data Sekunder, diolah (2024)

3.3 Metode Analisis Data

Untuk mencapai tujuan penelitian dan pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan Model Regresi Linier Berganda dengan menggunakan Software IBM SPSS 22. Estimasi model yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan OLS (*Ordinary Least Squares*) dan evaluasi regresinya meliputi uji statistik dan uji asumsi klasik. Uji statistik meliputi kebaikan garis regresi, uji kelayakan model, dan uji signifikansi variabel independen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa regresi berganda yaitu analisa yang digunakan untuk memahami variabel-variabel bebas mana saja yang dapat

berhubungan dengan variabel terikat, serta untuk mengetahui bentuk hubungan antar variabel.

Data kemudian diolah dengan teknik analisis kuantitatif menggunakan statistik deskriptif melalui bantuan *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS). Uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan. Salah satu cara yang umum digunakan adalah uji validitas konstruksi. Validitas mengacu pada sejauh mana suatu instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2013). Sedangkan Reliabilitas adalah ukuran konsistensi dan stabilitas suatu instrumen dalam menghasilkan data (Nuryadi *et al.*, 2017).

3.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Variabel-variabel yang digunakan yaitu untuk variabel dependennya adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di desa-desa se-kecamatan Ngariboyo, dan variabel independennya yaitu Kepemimpinan Kepala Desa, dan Pelaksanaan Fungsi BPD.

Selanjutnya sebelum melakukan analisis regresi, penting untuk melakukan uji asumsi klasik, yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji asumsi klasik adalah langkah penting dalam analisis regresi untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat yang diperlukan (Adi, 2016). Sedangkan untuk mengetahui besarnya pengaruh setiap variabel independen terhadap dependen, data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hal ini senada dengan (Widodo *et al.*, 2023) yang menyatakan bahwa regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen berdasarkan nilai dari dua atau lebih variabel independen. Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel secara parsial, dan uji F untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

4. Hasil Analisis dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan karakteristik responden, diantaranya jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan jabatan dalam pemerintah desa. Berdasarkan jenis kelaminnya, responden terbagi menjadi jenis kelamin perempuan yang sebanyak 52 orang (28%) dan laki-laki sebanyak 134 orang (72%). Sedangkan ditinjau dari pendidikan terakhir diperoleh responden dengan pendidikan diploma/S1 sebanyak 37 orang (19,89%), pendidikan SMA/SMK sebanyak 121 orang (65,06%), dan pendidikan dasar SD dan SMP/MTS sejumlah 28 orang (15,06%). Kemudian dilihat dari jabatannya dalam pemerintahan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori yakni: Perangkat Desa sejumlah 131 orang (70,43%); RT/RW sejumlah 24 orang (12,90%); Kader PKK sebanyak 9 orang (4,184%); Kader Posyandu sebanyak 9 orang (4,184%); Berdasarkan status kepegawaian dibedakan menjadi 3 golongan yakni: PNS sebanyak 29 orang (51,8%); kontrak sebanyak 22 orang (39,3%); PKK sebanyak 11 orang (5,91%); Linmas sebanyak 11 orang (5,91%).

4.1 Analisis Deskriptif

Data deskriptif disajikan agar dapat dilihat profil dari data responden penelitian dan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan. Data deskriptif menggambarkan

secara umum keadaan atau kondisi responden sebagai informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian. Oleh karena itulah dalam deskripsi karakteristik responden, dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yaitu berdasarkan jabatan dalam pemerintahan desa, jenis kelamin, tingkat pendidikan. Jumlah Responden dalam penelitian ini sebanyak 186 orang. Berikut ini data demografi sampel penelitian yang dirangkum kedalam tabel.

Tabel 2
Data Demografi Sampel Penelitian

Kategori	Jumlah	Keterangan
Jenis Kelamin		
Laki-laki	134	72%
Perempuan	52	28%
Tingkat Pendidikan		
SD	6	3,23%
SMP	22	11,83%
SMA	121	65,05%
Perguruan Tinggi	37	19,89%
Jabatan		
Perangkat Desa	131	70,43%
RT/RW	24	12,90%
Kader PKK	9	4,84%
Kader Posyandu	11	5,91%
Linmas	11	5,91%

Sumber: Data Primer, diolah (2024)

Hasil analisis deskripsi jawaban responden terhadap Kepemimpinan Kepala Desa (X1) memiliki nilai rata-rata sebesar 87,3387. Ini menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian tinggi terhadap kepemimpinan kepala desa, yang dapat diartikan bahwa perangkat desa dan LKD cenderung merasa puas dengan kemampuan kepemimpinan kepala desa. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (X2) memiliki nilai rata-rata sebesar 86,9032. Hal ini menunjukkan bahwa kons perangkat desa dan LKD memberikan penilaian yang sangat tinggi terhadap Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y), variabel yang menjadi fokus penelitian, memiliki nilai rata-rata sebesar 89,1828. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat desa dan LKD umumnya memberikan penilaian positif terhadap kepemimpinan kepala desa dan juga pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan nilai-nilai rata-rata yang tinggi pada setiap variabel, dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan, responden cenderung memberikan penilaian yang baik terhadap kepemimpinan kepala desa dan fungsi pengawasan BPD. Kepemimpinan kepala desa merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa masih tergolong beragam, meskipun kepemimpinan kepala desa dan fungsi pengawasan BPD tergolong cukup baik.

4.2 Uji Normalitas

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai koefisien Varian variabel Kepemimpinan Kepala Desa adalah 9,64; variabel peran dan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) koefisiennya 9,97 dan koefisien varian Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa adalah 11,59. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian ini memenuhi asumsi normalitas yaitu datanya berdistribusi normal.

4.3 Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil perhitungan nilai toleransi untuk semua variabel independen adalah lebih besar dari 0,1. Nilai toleransi yang lebih besar dari 0,1 menunjukkan bahwa variabel independen tersebut tidak terlalu berkorelasi dengan variabel independen lainnya. Nilai VIF untuk semua variabel independen adalah lebih kecil dari 10. Nilai VIF yang lebih kecil dari 10 menunjukkan bahwa variabel independen tersebut tidak berkorelasi secara sempurna dengan variabel independen lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian ini memenuhi asumsi multikolinearitas, yaitu tidak ada multikolinearitas antar variabel independen Kepemimpinan Kepala Desa dengan peran dan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam model regresi.

4.4 Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil perhitungan nilai signifikansi dari uji heteroskedastisitas untuk semua variabel independen Kepemimpinan Kepala Desa serta variabel Fungsi BPD lebih besar dari 0,05. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis nol, yaitu bahwa varians dari residual adalah sama untuk semua pengamatan. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian ini memenuhi asumsi heteroskedastisitas, artinya bahwa model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Fungsi regresi linier berganda tentang Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Dan Fungsi BPD Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa merupakan bentuk matematis dari nilai-nilai koefisien regresi variabel dependen dan independennya. Nilai koefisien regresi dari hasil analisisnya menunjukkan arah kecenderungan pengaruh variabel independen terhadap dependennya. Tabel 2 menunjukkan hasil analisis regresi linier berganda dan koefisien regresi beserta nilai signifikansinya.

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,245	5,199		,47	,962
1 X ₁	,472	,082	,384	5,749	,000
X ₂	,549	,080	,461	6,891	,000

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan adanya pengaruh kepemimpinan kepala desa dengan Fungsi BPD terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di desa se-kecamatan Ngariboyo, sekaligus untuk menjawab perumusan masalah pertama dalam penelitian ini. Sebagai variabel independent adalah Kepemimpinan Kepala Desa serta Fungsi BPD, sedangkan untuk variabel dependent adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Adapun nilai-nilai hasil analisis regresi dalam perhitungan ini sebagai berikut:

4.6 Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi regresi dilakukan untuk menguji seberapa jauh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model penelitian mempunyai pengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Semakin kecil nilai R^2 , maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin terbatas (Mardiatmoko, 2020). Nilai R^2 berkisar dari 0-1 atau 0% - 100%. Semakin mendekati nilai 1 atau 100%, berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil perhitungan menggunakan *IBM SPSS 22* sebagai alat bantu pengolahan data diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) 0,614 atau 61,4%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan variabel independen Kepemimpinan Kepala Desa (X_1) dan Fungsi BPD (X_2) yang dimasukkan kedalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa) sebesar 61,4%; sedangkan sisanya sebesar 38,6% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak terdapat atau tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.7 Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t digunakan untuk menganalisis pengaruh suatu variabel independen secara individual/partial dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Zahriyah et al., 2021). Untuk mengetahui apakah Kepemimpinan Kepala Desa serta Fungsi BPD berpengaruh signifikan atau tidak terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa adalah melalui perhitungan yang dapat digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis yang dirumuskan, yaitu dengan melihat signifikansi masing masing variabel bebas dengan taraf signifikan = 0,05. Apabila tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 artinya secara parsial variabel dependent tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent. Hasil signifikansi uji t untuk model regresi linier berganda yang di teliti dapat di lihat pada Tabel 2 diatas.

Tabel 2. menjelaskan hasil uji statistik t sebagai berikut yaitu pertama berdasarkan hasil perhitungan uji statistik t, variabel Kepemimpinan Kepala Desa memiliki nilai t-hitung sebesar 5,749 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian H_a diterima, artinya kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Kedua, variabel fungsi BPD memiliki nilai t-hitung sebesar 6,891 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian H_a diterima, artinya Fungsi BPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.8 Pembahasan

4.8.1 Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Dari Tabel 4.11 hasil uji parsial (uji-T) variabel Kepemimpinan Kepala Desa diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), dan nilai T_{hitung} sebesar $5,749 > T_{tabel} 1,97280$. Hasil ini membuktikan bahwa variabel Kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, sehingga hipotesis pertama atau H1 dalam penelitian ini diterima.

Berdasarkan data dari kuisioner yang telah diisi oleh perangkat desa dan LKD di desa-desa se-kecamatan Ngariboyo, sebagian besar memberikan jawaban positif terhadap Kepemimpinan Kepala Desa. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata skor Kepemimpinan Kepala Desa sebesar 56,774 dengan skor tertinggi 65. Perangkat desa dan LKD menganggap bahwa kepala desa saat ini mampu memimpin desa dengan baik sesuai dengan teori Tjokroamidjojo dalam Hermawan (2023) bahwa Kepemimpinan Kepala Desa sebagai fasilitator, mobilisator dan motivator, sehingga rata-rata akuntabilitas pengelolaan dana desa juga baik.

Penelitian ini senada dengan temuan Riyatna & Gayatri Gayatri (2021) yang menyatakan bahwa kepemimpinan kepala desa dan kompetensi perangkat desa memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Denpasar Utara.. Kepemimpinan merupakan aspek yang paling nyata dalam mewujudkan *good government* dengan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun pemerintah.

Demikian juga hasil penelitian ini didukung oleh Nandyasa Vania Sarinastiti & Bhilawa (2023) bahwa kepemimpinan kepala desa menjadi bagian yang utama dalam pengelolaan dana desa, namun masih banyak ditemukan adanya penyalahgunaan dana desa oleh aparat pemerintah desa terutama kepala desa. Selain itu kurangnya pengawasan dari masyarakat menyebabkan maraknya kasus korupsi dana desa di lingkungan pemerintahan desa. Budaya patriarkhi menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama masih dominan di Indonesia, tidak banyak kaum perempuan saat ini yang menjadi pemimpin. Sarinastiti & Bhilawa (2023) menyimpulkan bahwa kepemimpinan kepala desa dan pengawasan masyarakat berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. tetapi maskulinitas tidak memoderasi pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan maskulinitas memoderasi pengaruh pengawasan masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kepemimpinan kepala desa positif pengaruhnya pada berbagai aspek, sebagaimana dijelaskan oleh Basri *et al.*, (2021) bahwa kepemimpinan kepala desa menjalankan peran Motivator, Fasilitator, dan Mobilisator dalam peningkatan IDM sudah dilakukan dengan baik, Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa peran tersebut

kurang berpengaruh terhadap peningkatan status desa. Hal ini dipengaruhi secara langsung oleh struktur sosial dan tingkat partisipasi masyarakatnya. Fluktuasi status desa yang terjadi ternyata dipengaruhi oleh jumlah dan porsi alokasi dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa dari tahun 2018, 2019, dan 2020. Disisi lain, Temuan penelitian Krisnanti *et al.*, (2022) menyatakan bahwa Kepemimpinan, kejelasannya target anggaran, dan pengawasan memiliki pengaruhnya yang positif signifikan terhadap akuntabilitas mengelola keuangan desanya. Mengacu terhadap kesimpulannya yang dipaparkan, kemudian disarankan kepada pemerintah desa yang berada di Kecamatan Bebandem Karangasem diharapkan secara rutin memberikan pelatihan kepada kepala desa, agar pada saat memimpin bawahannya dapat dipimpin dengan baik dan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Prestasi kerja, keahlian, perilaku dan kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa (Silviyana et al., 2022).

4.8.2 Pengaruh Fungsi BPD Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah pengaruh Fungsi BPD terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Tabel 4.11 tentang hasil uji parsial (uji-T) variabel Fungsi BPD diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), dan nilai T_{hitung} sebesar $6,891 > T_{tabel}$ 1,97280. Hasil ini membuktikan bahwa variabel Fungsi BPD berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, sehingga hipotesis kedua atau H2 dalam penelitian ini diterima.

Berdasarkan tabulasi data, sebagian besar perangkat desa dan LKD di desa-desa se-kecamatan Ngariboyo memberikan jawaban positif terhadap Peran dan Fungsi BPD, ditunjukkan dengan nilai rata-rata skor Fungsi BPD sebesar 43,45 dengan skor tertinggi 50. Perangkat desa dan LKD di desa-desa se-kecamatan Ngariboyo menganggap Peran serta Fungsi BPD saat ini mampu memberikan kontribusi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi BPD yaitu keterwakilan, pengawasan dan fungsi legislatif, sehingga rata-rata akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa-desa se-kecamatan Ngariboyo juga baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurhayati et al., (2021) yang menyatakan bahwa makin baik peran BPD dalam mengawasi pemerintah desa, maka potensi terjadinya kesalahan dan kecurangan juga akan makin kecil. Artinya, makin baik pengawasan BPD, maka akan makin akuntabel pula pengelolaan keuangan desa. Sesuai juga dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Zahro et al., (2023) dan Umaira & Adnan (2019) yang menyatkan bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.8.3 Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa serta Fungsi BPD Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini tentang Kepemimpinan Kepala Desa serta Fungsi BPD terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Tabel 4.10 menunjukkan hasil uji signifikansi simultan diperoleh nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F_{hitung} sebesar $148,410 > F_{tabel}$ 3,04; membuktikan bahwa variabel Kepemimpinan Kepala Desa serta

Fungsi BPD secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, sehingga hipotesis pertama atau H1 dalam penelitian ini diterima.

Kemudian Tabel 4.9 tentang uji koefisien determinasi diperoleh persentase pengaruh variabel independen secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa menunjukkan nilai *R Square* (R^2) sebesar 0,614 atau 61,4%. Berarti variabel Kepemimpinan Kepala Desa serta Fungsi BPD mampu menjelaskan pengaruhnya secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebesar 61,4% dan 38,6% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini, seperti kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, motivasi perangkat desa dan lain-lain. Analisis uji partial kedua variabel independen, juga menunjukkan bahwa variabel Kepemimpinan Kepala Desa serta Fungsi BPD mampu menjelaskan pengaruhnya secara simultan dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Koefisien regresi kedua variabel ini menunjukkan nilai koefisien regresi positif.

Purba *et al.* (2023), sejalan dengan penelitian ini yang menguji pengaruh kompetensi aparatur pemerintah desa, partisipasi warga, penerapan teknologi informasi, komitmen organisasi, transparansi, dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa, partisipasi warga, penerapan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, namun komitmen organisasi dan transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kompetensi perangkat desa yang memadai, partisipasi warga yang tinggi, penerapan teknologi informasi yang baik, dan penerapan sistem pengendalian intern yang tepat dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di masa pandemi COVID-19. Pada akhirnya, faktor kepemimpinan dan pengawasan masyarakat melalui BPD, mempengaruhi efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada waktu yang sama atau sepanjang waktu (Ayuandani & Muniruddin, 2022). Dengan demikian, variabel Kepemimpinan Kepala Desa, serta Fungsi BPD berperan dan pengaruhnya positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

5. Simpulan Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kepemimpinan Kepala Desa dan Fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Rakyat) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Ngariboyo. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan Kepala Desa dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara individual berpengaruh nyata terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian ini memiliki signifikansi yang penting dalam Kepemimpinan Kepala Desa yang secara simultan dengan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berpengaruh nyata terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, maka disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menambah variabel selain yang diteliti jika akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, dan lokasi penelitiannya juga bisa diperluas menjadi satu Kabupaten/Propinsi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan

rujukan bagi OPD, khususnya Kecamatan Ngariboyo sebagai dasar pembinaan dan manajemen terhadap pola Kepemimpinan Kepala Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu sebagai dasar untuk mengajukan kepada Bupati agar diadakan diklat khusus bagi Kepala Desa dan BPD, sebelum dilantik, agar memahami tugas pokok dan fungsi dari Kepala Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Referensi

- Adi, R. P. (2016). Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS. In P. C. Ambarwati (Ed.), *Cv. Wade Group* (Cetakan Pe). WADE GROUP.
- Akbar, D. S. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) (Penelitian Pada Desa-desa di Wilayah Kecamatan Sadananya). *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 5(2), 109–120. <https://doi.org/10.25157/je.v5i2.958>
- Ayem, S., & Fitriyaningsih, E. (2022). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 24(2), 446–463. <https://doi.org/10.29264/jfor.v24i2.10869>
- Ayuandani, K., & Muniruddin, S. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Kepemimpinan Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 7(2), 299–307. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i2.21045>
- Azhari, I. P., Putri, A. A., Marlina, E., Suci, R. G., Rodiah, S., Azmi, Z., Armel, R. S., Henur, R. A., Rahayu, N., & Bustamin, B. (2021). Peran BPD Sebagai Mitra Pemdes dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *PROGRESIF: Jurnal Pengabdian Komunitas Pendidikan*, 1(2), 65–70. <https://doi.org/10.36406/progresif.v1i2.446>
- Badu, S. Q., & Djafri, N. (2017). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* (Edisi Pert). Ideas Publishing.
- Basri, M., Yulianto, Y., & Prihantika, I. (2021). Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Peningkatan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Pringsewu. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 15–24. <https://doi.org/10.47753/pjap.v2i1.26>
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(2), 1269–1298. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i02.p16>
- Erlina, L., Fazlurrahman, H., Nugrohoseno, D., & Wardoyo, D. T. W. (2023). Improving Performance Through Transformational Leadership and Self-Efficacy: Mediating role of Innovative Work Behavior. *RELEVANCE: Journal of Management and Bussines* ■, 6(2), 127–141.
- Fatolosa Hulu, & Rahim, R. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Hilina’a Kecamatan Gunungsitoli. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (Fair Value)*, 4(6), 2312–2320. <https://doi.org/10.1002/9781119558361.ch20>
- Faysal, A. (2023). Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam

- Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Studi Kasus Di Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik). *Publika*, 11(3), 2215–2230. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n3.p2215-2230>
- Firmansyah, A., Chen, M. H., Junaedi, I. W. R., Arwani, M., & Kistyanto, A. (2022). The Role of Transformational Leadership and Knowledge Management and Learning Organization on Vocational Schools Performance During Digital Era. *Frontiers in Psychology*, 13(May), 1–4. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.895341>
- Freestone, D. M., & Balci, F. (2019). Bayesian Behavioral Systems Theory. *Behavioural Processes*, 168(July), 103904. <https://doi.org/10.1016/j.beproc.2019.103904>
- Han, Y., & Perry, J. L. (2020). Employee accountability: development of a multidimensional scale. *International Public Management Journal*, 23(2), 224–251. <https://doi.org/10.1080/10967494.2019.1690606>
- Hermawan, N. J. (2023). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Sako Makmur Kecamatan Sembawa Kabupaten Cianjur. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9741–9750. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/view/4603>
- Jahira, J., Madani, M., & Haerana, H. (2023). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Tongkonan Basse Kabupaten Enrekang. *Journal Unismuh*, 4(2, April 2023), 368–384. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index%0APENGARUH>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2019). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. In *Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership* (pp. 77–132). Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674274051-006>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>
- Khan, S. F., Junita, A., & Azhar, I. (2023). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dengan Perilaku Pemimpin Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 8(1), 60–71. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v8i1.21906>
- Krisnanti, N. N. P., Pandnyawati, K. D., & Hutnaleontina, P. N. (2022). Pengaruh Kepemimpinan, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem. *Hita Akuntansi Dan Keuangan, Januari*, 124–130.
- Mahayani, N. L. A. (2017). Prosocial Behavior Dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(2), 129–144. <https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i02.p07>
- Mahyudin, M., Mihzan, L. M. F., Asrin, A., & Nurlinda, N. (2022). Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 11(1), 82–88. <https://doi.org/10.33366/jisip.v11i1.2444>
- Mardiatmoko, G. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier

- Berganda (Studi Kasus Penyusunan Persamaan Allometrik Kenari Muda [Canarium Indicum L.). *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 14(3), 333–342. <https://doi.org/0.30598/barekengvol14iss3pp333-342>
- Nafsiah, S. N., & Diana, M. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Indralaya. *JIBM (Jurnal Ilmiah Bina Manajemen)*, 3(2), 104–112.
- Nandyasa Vania Sarinastiti, & Bhilawa, L. (2023). Kepemimpinan Kepala Desa dan Pengawasan Masyarakat dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(2), 199–214. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i2.26417>
- Nurhayati, N., Purnama, D., & Mustika, M. (2021). Faktor-Faktor Pendukung Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 7(2), 215–234. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v7i2.4072>
- Nuryadi, Astuti, T. D., Utami, E. S., & Budiantara, M. (2017). *Dasar-dasar Statistik Penelitian* (Cetakan Ke). SIBUKU MEDIA.
- Pawirosumarto, S., & Sarjana, P. K. (2017). Factors affecting employee performance of PT.Kiyokuni Indonesia. *International Journal of Law and Management*, 59(4), 602–614. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-03-2016-0031>
- Pemerintah Pusat RI. (2014). *Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Pratama, J. A., & Islamuddin. (2024). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kinerja Aparatur Desa (Studi Kasus Desa Pagar Banyu, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma. *Jurnal Fokus Manajemen*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.37676/jfm.v4i1.5736>
- Purba, K., Saragih, R. B., & Purba, S. (2023). Determinasi Responsibilitas Tatakelola Keuangan Desa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(4), 482–497. <https://doi.org/10.22219/jaa.v5i4.21035>
- Purba, S., Napitupulu, J., & Siregar, A. (2023). Accountability of Village Fund Management During the Covid-19 Pandemic (Study On Village Government in Dayun District, Siak Regency). *The Indonesian Accounting Review*, 13(1), 115–131. <https://doi.org/10.14414/tiar.v13i1.3258>
- Purbandari, & Saptatiningsih, R. I. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Kewarganegaraan*, 4(1), 54–65. <https://doi.org/10.31316/jk.v4i1.886>
- Putri, A. P., & Yadiati, W. (2020). The Impact of Participative Leadership and Competencies on Performance of Village Fund Management. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 3(2), 42. <https://doi.org/10.24198/jaab.v3i2.27757>
- Rahmat, D., & Hermana, D. (2018). Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Untuk Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa. *Jurnal Publik*, 12(2), 10–17. <https://doi.org/10.52434/jurnalpublik.v12i2.3>
- Riyatna, K. D. D., & Gayatri Gayatri. (2021). Faktor yang Memengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Denpasar Utara. *E-Jurnal Akuntansi*,

31(12), 3273–3287. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i12.p18>

- Rumbia, E., Normawati, N., & Soselisa, P. S. (2023). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Di Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala). *Journal of Business Finance and Economic (JBFE)*, 4(1). <https://doi.org/10.32585/jbfe.v4i1.3793>
- Safitri, A. E., Pramono, J., & Istiyani, A. (2023). Pengaruh Good Government Governance Dan Perilaku Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus di Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang. *Jurnal Imagine*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.35886/imagine.v3i1.501>
- Safrida, S. N., & Priyanti, E. (2023). Implementasi Kebijakan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Guna Meningkatkan Aparatur Desa Ciangsana. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 11(2), 80–88. <https://doi.org/10.55678/prj.v12i1.1039>
- Scott, W. R. (2015). Financial Accounting Theory. In *Financial Accounting* (Sevev Edit). Pearson Canada Inc. All. <https://doi.org/10.4324/9780429468063>
- Siahaan, M., & Komariah, N. S. (2022). the Influence of the Leadership Style of the Village Headman and the Village Apparatus Competence on the Success of Development in Sriamur Village, Bekasi. *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature (IJOMRAL)*, 1(2), 121–240. <https://doi.org/10.53067/ijomral.v1i2.21>
- Silviyana, Taufik, & Syahputra, A. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Pintu Rime Gayo. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 4(1), 1–10.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cetakan Ke 19. Alfabeta. Bandung
- Sujatnika, I. N. J., & Sulindawati, N. L. G. E. (2022). Pengaruh Sistem Pelaporan, Kompetensi Perangkat Desa, Kepemimpinan Kepala Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(2), 378–388. <https://doi.org/10.23887/jippg.v3i2>
- Supriyadi, D., & Budiarto. (2012). *Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa dan Kapasitas Perangkat Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi*. 1–15.
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44–54. [https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5\(1\).3606](https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5(1).3606)
- Umaira, S., & Adnan. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(3), 471–4818. <https://doi.org/10.37478/jria.v4i2.3908>
- Vagelos, P. R., & Galambos, L. (2012). Moral Leadership. In *NASSP Bulletin* (Vol. 76,

Issue 547, pp. 144–172). Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1177/019263659207654719>

Widodo, S., Ladyani, F., Asrianto, L. O., Rusdi, R., Khairunnisa, Lestari, S. M. P., Wijayanti, D. R., Devriany, A., Hidayat, A., Dalfian, Nurcahyati, S., Sjahriani, T., Armi, Widya, N., & Rogayah. (2023). *Metode Penelitian* (Cetakan Pe). CV Science Techno Direct.

Zahriyah, A., Suprianik, Parmono, A., & Mustofa. (2021). *Ekonometrika : Teknik dan Aplikasi dengan SPSS* (Edisi Pert). Mandala Press.

Zahro, N. S., Liyani, Y. A., & Herlina Manurung. (2023). Faktor-Faktor Pendukung Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(3), 96–104. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i3.1497>

Penulis Korespondensi

Supriyati dapat dihubungi melalui: supriyati.23094@mhs.unesa.ac.id